

# ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) TERHADAP PARTISIPASI ORANG TUA MURID

*Denny Boy*<sup>1</sup>  
*Hotniar Siringoringo*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> mahasiswa

<sup>2</sup> Dosen

Akuntansi Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Gunadarma  
Jl. Margonda Raya No. 100 Depok 16424

<sup>1</sup>dennyboy3017@yahoo.co.id

<sup>2</sup>hotniars@staff.gunadarma.ac.id

## ABSTRACT

*The objective of this research is to measure the influence of accountability and transparency toward participation. However participation here is meant the willingness of student parents to share cost of school operation. Research object is stakeholders of public high schools in the area of Depok city. As research variables are latent in nature, questionnaire was used as research instrument, and structural equation modeling was used as analysis tool. Questionnaire were distributed to all stakeholders, i.e. school leaders, teacher, and school committees. Research variables are accountability, transparency, and participation. Result shows that accountability and transparency influence participation significantly.*

**Key words:** *accountability, transparency, participation*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Objek penelitian adalah SMA Negeri kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Instrumen penelitian adalah kuesioner, dimana orang tua murid, guru, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah menjadi responden. Variabel penelitian akuntabilitas, transparansi pengelolaan, dan partisipasi orang tua murid merupakan variabel laten, dengan demikian model persamaan struktural digunakan sebagai alat analisis data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.*

**Kata Kunci :** *Akuntabilitas, Transparansi pengelolaan APBS, Partisipasi Orang tua murid.*

## PENDAHULUAN

Dalam pasal 47 ayat 2 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan adalah dari pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan masyarakat. Dana dari pemerintah pusat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana

pendidikan dalam APBN setiap tahun mengalami peningkatan.

Dana penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dari APBN. Pihak sekolah juga harus menggalang dana dari orang tua murid. Karena dana penyelenggaraan pendidikan ini bersumber dari pihak lain, pengelola dana sudah seyogyanya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memotivasi orang tua murid untuk ikut berperan menanggung dana pendidikan.

Hasil riset yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2003 menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Sekolah tidak pernah mengumumkan jumlah subsidi yang diterima dari pemerintah, dan sekolah tidak pernah memberikan laporan pengelolaan dana kepada masyarakat secara transparan.

Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja suatu usaha atau organisasi sudah banyak diteliti akhir-akhir ini. Akuntabilitas dalam dunia pendidikan misalnya sudah dibicarakan oleh Choiri (2003), Livermore dan MacPherson (1999), dan Monk dan Roellke (1995); politik akuntabilitas (Fitz, 2003; Horsley, 2009); perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik (2006); akuntabilitas publik dalam masa pemerintahan neo liberal (Ramson, 2007). Transparansi di antaranya sudah diteliti oleh Stirton dan Lodge (2001).

Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna mewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa sarana dan prasarana sekolah adalah tanggung jawab

pemerintah dalam hal ini sekolah, ini merupakan pendapat yang keliru dan menunjukkan sikap yang kurang peduli dari orang tua murid terhadap pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan partisipasi orang tua murid sangat diharapkan oleh pihak sekolah. Partisipasi yang diberikan orang tua murid kepada satuan pendidikan dapat menyumbangkan sejumlah dana untuk penyelenggaraan pendidikan dan partisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana dari orang tua murid tersebut.

Dalam hal ini, tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan penekannya pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas berbagai dimensi. Ellwood (1993) dalam Mahsun (2006) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pengelola keuangan yang bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari warga sekolah dan orang tua murid.

Secara ringkas prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti a) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik, b) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, c) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi

maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Selama ini sebelum reformasi, pengelolaan pendidikan di banyak sekolah terkesan tertutup bagi pihak luar. Masyarakat, orang tua murid seolah olah tidak banyak mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di sekolah, tidak mengetahui pendapatan dan belanja sekolah, tidak dilibatkan dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kinerja sekolah dan sebagainya.

Pengelolaan yang dianggap tidak transparan berdampak negatif bagi perkembangan sekolah, karena orang tua murid akan meragukan sumbangan yang mereka berikan akan benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.

Partisipasi sangat berguna bagi sekolah di dalam memvalidasi premis darimana sebuah program berasal, maka dari itu akan berkontribusi terhadap efektivitas program. Ada 8 tingkat partisipasi, yaitu partisipasi aktif, partisipasi melalui pemberian informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk mendapatkan bantuan, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, Swamobilisasi, Katalisasi perubahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap Partisipasi Orang tua murid

dalam pembiayaan pendidikan di kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN

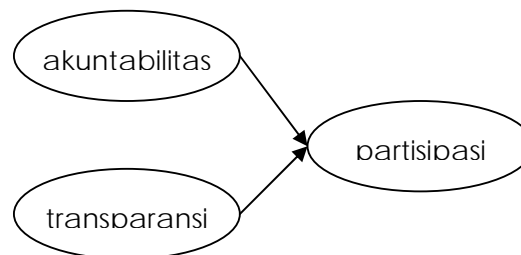
### Objek Penelitian dan Variabel Penelitian

Objek penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) yang berada di wilayah Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Jumlah SMA N yang masuk sebagai objek penelitian ini adalah 6.

Variabel penelitian adalah akuntabilitas, transparansi pengelolaan, dan partisipasi orang tua murid. Ketiga variabel merupakan variabel laten, yang diukur menggunakan beberapa indikator.

### Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Karena ketiga variabel merupakan variabel laten, yang diukur menggunakan beberapa indikator, maka kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian. Kuesioner dikembangkan menggunakan tipe tertutup, dengan pilihan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Dikembangkan 12 pertanyaan untuk variabel akuntabilitas, 10 pertanyaan untuk variabel transparansi, dan 10 pertanyaan untuk variabel partisipasi. Model penelitiannya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

Kuesioner terlebih dahulu divalidasi dan diuji reliabilitasnya. Kuesioner yang sudah valid dan reliabel didistribusikan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah unsur pimpinan sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara), guru, orang tua murid, dan komite sekolah.

Jawaban dari responden dikodekan menggunakan skala Likert. Dua variabel pertama, yaitu akuntabilitas dan transparansi merupakan variabel bebas, dan variabel partisipasi merupakan variabel terikat. Karena ketiga variabel merupakan variabel laten, model persamaan struktural digunakan untuk menganalisis data. Model persamaannya adalah:

$$Partisipasi = c + \beta_1 \text{akuntabilitas} + \beta_2 \text{transparansi} + \varepsilon$$

Hipotesis yang diuji adalah:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
2. Transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
3. Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validasi dan Reliabilitas

Variabel akuntabilitas diukur menggunakan 12 indikator, yaitu 3 indikator berhubungan dengan visi dan misi, 3 indikator berhubungan dengan keterlibatan orang tua murid dalam perencanaan APBS, indikator dasar perencanaan APBS, 4 indikator tentang pelaporan, dan indikator kepanitiaan kegiatan. Uji validitas menghasilkan hanya

7 indikator yang valid, yaitu keterlibatan komite sekolah dalam pembuatan visi dan misi, keharusan adanya visi dan misi, perancangan APBS yang selalu mengacu pada visi dan misi, keterlibatan semua pihak dalam penetapan APBS, sekolah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan, setiap kegiatan selalu membentuk kepanitiaan, dan dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana masyarakat, sekolah membuat laporan keuangan.

Variabel transparansi diukur menggunakan menggunakan 10 indikator. Hasil uji validasi menunjukkan hanya satu yang tidak valid. Indikator yang valid dengan demikian adalah sekolah menyediakan wadah untuk menampung aspirasi orang tua/masyarakat, sekolah menyediakan papan pengumuman penyerapan dana dan penggunaan anggaran, sekolah memberikan laporan penggunaan anggaran kepada komite sekolah secara periodik (setiap 1 tahun), dan sekolah memberikan laporan penggunaan anggaran kepada dinas pendidikan secara periodik.

Variabel partisipasi juga diukur menggunakan 10 indikator. Hanya 5 indikator yang valid dan diteruskan ke analisis data, yaitu keterlibatan orang tua/komite sekolah dalam pembuatan visi dan misi, keterlibatan orang tua murid dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBS, keterlibatan orang tua/komite sekolah dalam penyusunan APBS, permintaan keringanan biaya sekolah, dan adanya subsidi silang. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa ketiga variabel dengan indikator masing-masing yang valid adalah reliabel.

### Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola maupun pengguna APBS baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta unsur orang tua murid

dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah, seluruh Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di kota Depok. Responden diklasifikasikan menurut kedudukan, umur dan jenis kelamin. Unsur sekolah sebanyak 76% dan sisanya adalah orang tua/komite sekolah. Sebanyak 44% dari responden adalah laki-laki. Dilihat dari kisaran usia, responden dengan usia kurang dari 35 tahun ada sebanyak 19%, pada usia dengan kisaran 35 – 45 tahun ada sebanyak 51%, dan sisanya berada pada usia lebih dari 45 tahun.

## Pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi

Secara parsial, pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dievaluasi. Tabel 1 menunjukkan output Lisrel tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan APBS terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.

Tabel 1  
Output pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi

$\text{PARTISIP} = 0.882 * \text{AKUNTABI}, \text{Errorvar.} = 0.222, R^2 = 0.778$ <p style="text-align: center;">(0.175) 5.041</p>
---

Sumber hasil olahan LISREL 8.54

Kesalahan standar 0.175 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5.041 menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan pada taraf nyata 5% terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Besarnya pengaruh akuntabilitas pengelolaan APBS terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan adalah 0.882. Pengaruhnya cukup kuat, di atas 0.5. Dilihat dari koefisien determinasi ( $R^2$ ), dapat diartikan bahwa 77.8% partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh akuntabilitas pengelolaan APBS.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Choiri (2003) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sangat penting untuk mempertanggungjawabkan setiap program/kebijakan baik proses maupun hasilnya. Di sisi lain, partisipasi pimpinan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Wiremon, dkk., 2007).

Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan, perbuatan, dan kealpaan seseorang kepada yang berkepentingan (Hunt, 2006). Akuntabilitas dalam pengelolaan APBS dengan demikian adalah kemauan pihak sekolah (pimpinan dan bendahara) dalam memberikan penjelasan dan justifikasi penerimaan dan penggunaan anggaran. Pihak yang berkepentingan, dalam hal ini orang tua murid, dapat mengakses informasi penerimaan dan penggunaan APBS. Tugas ini dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban keuangan. Kemauan yang tinggi dari pimpinan sekolah dalam memberikan pertanggungjawaban APBS dapat meningkatkan partisipasi orang tua murid untuk ikut berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Khususnya dana yang bersumber dari orang tua murid, harus dikelola secara akuntabel guna memberikan kepercayaan pada orang tua murid sehingga orang tua murid akan me-

meningkatkan partisipasinya dalam pembiayaan pendidikan. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan masih berpartisipasinya orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan antara lain karena aturan-aturan yang berlaku, rasa malu, merasa memang sudah merupakan kewajiban semata.

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran APBS dikategorikan sebagai akuntabilitas finansial. Fokus utama akuntabilitas finansial ini dengan demikian adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa dana telah digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan

nilai uang serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, kesalahan manajemen, atau korupsi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan dana.

### **Pengaruh transparansi terhadap partisipasi**

Tabel 2 menunjukkan output Lisrel tentang pengaruh transparansi terhadap partisipasi. Nilai kesalahan baku 0.167 dan  $t_{hitung}$  sebesar 4.595 menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan APBS terbukti berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5% terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.

Tabel 2  
Output pengaruh transparansi terhadap partisipasi

$PARTISIP = 0.768 * TRANSPAR, Errorvar. = 0.410, R^2 = 0.590$ <p style="text-align: center;">(0.167) 4.595</p>
--

Sumber hasil olahan LISREL 8.54

Besarnya pengaruh transparansi pengelolaan APBS terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan sebesar 0.768. Koefisien regresinya lebih besar dibandingkan dengan 0.5, ini berarti bahwa transparansi pengelolaan APBS berpengaruh kuat dan positif terhadap partisipasi orang tua murid. Semakin transparan pengelolaan APBS semakin besar partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.590, artinya partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan APBS sebesar 59.0% dan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 41,0%.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Werimon, dkk (2007) yang menyatakan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh cukup signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar 0,266. Akan tetapi berbeda dengan yang disampaikan Choiri (2006) dalam penelitiannya, bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan tidak membawa perubahan yang signifikan, karena dalam pelaksanaan masih terdapat berbagai macam penyimpangan penyimpangan, antara lain motivasi, kemampuan tenaga pelaksana/pengelola, sikap moral

masyarakat serta lingkungan sosial yang tidak sehat.

Transparansi penting, paling tidak karena tiga alasan yaitu pertama, untuk menjamin bahwa pemerintah akan merencanakan program secara tepat; kedua untuk menjamin pemerintah tidak akan menipu publik dan ketiga untuk mendukung kebijakan pemerintah (Infid, 2002).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa sikap transparansi dalam pengelolaan APBS dituntut agar orang tua murid lebih bisa percaya dan tidak menduga-duga yang keliru, hal demikian juga akan dapat meningkatkan partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Sementara itu faktor lain yang membuat masih berpartisipasi orang tua murid dalam pembiayaan

pendidikan antara lain karena adanya aturan/ketentuan yang mengikat, merasa mempunyai kewajiban, menjaga moral anak/murid di mata teman-temannya.

### **Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap partisipasi**

Akuntabilitas dan transparansi secara simultan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 2. Koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0.783 dan transparansi sebesar 0.12. Setiap unit kenaikan akuntabilitas dan transparansi keuangan dapat menaikkan partisipasi orang tua murid sebesar 0.783 dan 0.12 secara berturut-turut.

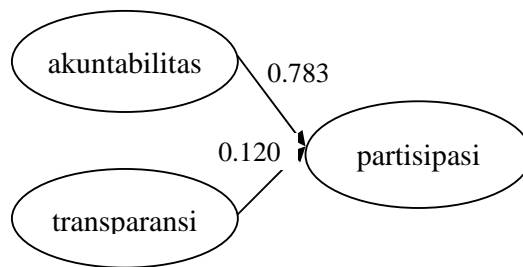
Tabel 3  
Output pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap partisipasi

PARTISIP = 0.783*AKUNTABI + 0.120*TRANSPAR, Errorvar.= 0.217 , R <sup>2</sup> = 0.783		
(0.292)	(0.236)	(0.117)
2.679	0.508	1.851

Sumber hasil olahan LISREL 8.54

Kontribusi kedua variabel ini terhadap partisipasi orang tua murid juga dapat dilihat dari koefisien determinasinya. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

sebesar 0.783, yang berarti variabel akuntabilitas dan transparansi berkontribusi sebesar 78.3% terhadap varians variabel partisipasi.



Gambar 2. Diagram struktural variabel penelitian

Akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi pengelola APBS. Sudah seyogyanyalah pengelola APBS lebih mengutamakan peningkatan akuntabilitas dan tingkat transparansinya agar orang tua murid dapat lebih percaya, sehingga partisipasi orang tua muridpun terhadap pembiayaan pendidikan lebih dapat ditingkatkan. Dengan sikap akuntabilitas yang lebih baik dan didukung dengan sikap transparan, maka partisipasi yang dituntut dari orang tua murid akan meningkat dengan sendirinya, sehingga sekolah sebagai satuan pendidikan dapat dengan leluasa merencanakan, dan melaksanakan program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah, dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002; Mahsun, 2006; Tajudin, 2008).

Akuntabilitas pelaporan yang diberikan pimpinan sekolah harus berkaitan dengan yang dapat dipertukarkan dengan sebenar-benarnya, dan berkaitan dengan terdapat saling keterkaitan yang bersifat tertutup.

Menurut Bappenas dan Depdagri (2002) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini adalah penyelenggaraan sekolah sebagai sebuah institusi pemerintah.

Keterbukaan sekolah sebagai sebuah institusi pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat sekolah menjadi bertanggung jawab kepada semua pihak terkait yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Akuntabilitas dalam siklus anggaran dan transparansi anggaran diperlukan untuk meningkatkan pengawasan (Coryanata, 2007).Mardiasmo (2002) me-nyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari sistem perencanaan strategik, sistem pengukuran kinerja, sistem pelaporan keuangan, saluran akuntabilitas publik, dan auditing sektor publik.

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat/orang tua murid. Untuk itu masyarakat / orang tua murid ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah baik pemikiran, tenaga, maupun dana melalui komite sekolah, atau wadah-wadah resmi lainnya.

Besarnya dana yang berasal dari orang tua murid diputuskan dalam suatu musyawarah orang tua dan pihak sekolah, serta disahkan oleh komite sekolah. Dalam perjalanannya penggunaan dana tersebut diawasi oleh komite sekolah tersebut. Untuk itu diperlukan sikap akuntabilitas dan transparansi pengelola anggaran tersebut.

Akan tetapi, apabila tingkat akuntabilitas tersebut berkurang atau terjadi penurunan, hal ini membuat rasa percaya orang tua murid juga ikut berkurang dan juga tingkat transparan pihak satuan pendidikan sangat rendah, akan berdampak pada rendahnya partisipasi orang tua murid dalam menyangga biaya penyelenggaraan pendidikan



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sikap akuntabel dan transparan satuan pendidikan dalam Pengelolaan APBS jika dilakukan baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Jika dibandingkan antara sikap akuntabilitas dan transparansi, pengaruh akuntabilitas lebih kuat dibandingkan pengaruh transparansi terhadap partisipasi orang tua murid. Semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid, maka akan semakin tinggi partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

### Saran

Partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi. Masih ada 21.7% kontribusi faktor lain dalam mempengaruhi partisipasi orangtua murid. Faktor-faktor itu perlu diidentifikasi dalam penelitian di masa mendatang

### DAFTAR PUSTAKA

- Choiri, N. H. 2003. "Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Studi Kasus tentang Akuntabilitas Administratif Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Adminsitrasi Publik*, Vol. IV, No. 1, 2003.
- Ellwood. 1993. Di dalam Mahsun, M. 2006. [www.google.co.id](http://www.google.co.id), 7 Agustus 2008
- Fitz, J. 2007. "The Politics of Accountability: A Perspective From England and Wales." *Peabody journal of Education*, Vol. 79, No. 4, pp. 230-241.
- Horsley, Stephanie. 2009. "The Politics of Accountability: Implication for Centralized Music Education Policy Development and Implementation." *Arts Education Policy Review*, Vol. 110, No. 4, pp. 6-13.
- Hunt, G. 2006. "The Principle of Complementarity: Freedom of Information, Public Accountability and Whistleblowing." *In Open Government in a Theoretical and Practical Context*, Ed. R. Chapman and M. Hunt, pp. 43-54, Burlington, VT: Ashgate.
- Livermore, J. And MacPherson, G.E. 1999. "Expanding the Role of the Arts in the Curriculum: Some Australian Initiatives." *Arts Education Policy Review*, Vol. 101, NO.3, pp. 10-15.
- Mardiasmo. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance." *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2, No.1.
- Monk, D.H. and Roellke, C.F. 1995. "Accountability, Resource Allocation and the Production of Educational Outcomes." *International Journal of Educational Research*, Vol. 27, No. 6, pp. 493-503.
- Ramson, S. 2007. "Public Accountability in the Age of Neo-Liberal Governance." *In the RoutledgeFalmer Reader in Education Policy and Politics*, ed. B. Lingard and J. Ozga, pp. 198-219, New York, Routledge.
- Stirton, L. and Lodge, M. 2001. "Transparency Mechanism: Building Publicness into Public Services." *Journal of Law and Society*, Vol. 28, No. 4, pp. 97-102